



EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM DI EMPAT ZONASI PANTAI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Evaluation of the Implementation of the Climate Village Program in Four Coastal Zonings of South Sulawesi Province

¹Indah Suciasih, ²Asjulia, ¹Andi Abdul Rahman Syafar

¹Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Islam Makassar

²Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Islam Makassar

*Email: indahsuciasih16@gmail.com

ABSTRACT

The research aims to evaluate the Climate Village Program (ProKlim) for the last 5 years in terms of distribution and the role of government and communities in four coastal zones of South Sulawesi Province. The research was conducted at the Sulawesi Regional Climate Change Control Center with the locus of four districts representing four coastal zones in South Sulawesi Province, namely Bone Regency, Bulukumba Regency, Gowa Regency and Maros Regency. The research lasts from August to October 2023. Researchers processed ProKlim location distribution data and distributed questionnaires to local government representatives and communities at ProKlim locations using Purposive Sampling. The method used is qualitative descriptive and data analysis with Likert Scale. The results showed that the distribution of ProKlim in South Sulawesi Province for the last 5 years (2018-2022) was the highest in 2022 with 71 locations and the least was in 2021 with 30 locations. The most ProKlim locations are in Bone Regency with 41 locations, Bulukumba Regency with 31 locations, Gowa Regency with 30 locations and Maros Regency with 29 locations. Based on research conducted regarding the role of local governments and communities in influencing ProKlim, it is known that in the section local government representatives have an understanding of 83.53% which means they understand very well and in the section representatives of ProKlim locations are 79.73% who understand.

Keywords: evaluation, Climate Village Program, South Sulawesi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Kampung Iklim (ProKlim) selama 5 tahun terakhir dari segi sebaran serta peran pemerintah dan masyarakat di empat zonasi pantai Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian dilaksanakan di Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Sulawesi dengan lokus empat kabupaten yang mewakili empat zonasi Pantai di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros. Penelitian berlangsung mulai bulan Agustus sampai Oktober 2023. Peneliti mengolah data sebaran lokasi ProKlim dan menyebarkan kuisioner kepada perwakilan pemerintah daerah dan masyarakat di lokasi ProKlim menggunakan *Purposive Sampling*. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan analisis data dengan Skala *Likert*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sebaran ProKlim di Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 tahun terakhir (2018-2022) paling tinggi adalah tahun 2022 sebanyak 71 lokasi dan paling sedikit adalah tahun 2021 sebanyak 30 lokasi. Lokasi ProKlim paling banyak adalah di Kabupaten Bone yaitu 41 lokasi, Kabupaten Bulukumba sebanyak 31 lokasi, Kabupaten Gowa sebanyak 30 lokasi dan Kabupaten Maros sebanyak 29 lokasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam mempengaruhi ProKlim, diketahui bahwa pada *section* perwakilan pemerintah daerah memiliki pemahaman 83,53% yang artinya adalah sangat paham dan pada *section* perwakilan dari lokasi ProKlim adalah 79,73% yaitu paham.

Keywords: evaluasi, Program Kampung Iklim, Sulawesi Selatan

PENDAHULUAN

Konsentrasi dari gas rumah kaca yang semakin meningkat merupakan hasil dari aktivitas manusia yang mengakibatkan meningkatnya sinar UV dari radiasi yang dihasilkan sinar matahari dan terperangkap dalam atmosfer. Hal tersebut mengakibatkan adanya kenaikan suhu bumi yang menyebabkan global warming atau pemanasan global. Berdasarkan data tersebut, jika tidak dilakukannya upaya dalam mengontrol jumlah timbulan emisi GRK dapat diperkirakan pada tahun 2100, suhu secara global diprediksi akan semakin meningkat antara 1,8 – 4,0 °C jika apabila dibandingkan dengan rata-rata suhu bumi yang ada di tahun 1980-1999. Perubahan iklim menimbulkan risiko yang besar untuk pembangunan ekonomi, kesehatan manusia, dan keamanan pangan. Dampak dari adanya perubahan iklim sangat signifikan dan mempengaruhi banyak sektor sehingga diperlukan penyelesaian yang berkesinambungan agar segala kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang melibatkan banyak pihak dapat disinergikan pada pembangunan nasional (Direktorat Jenderal PPI, 2021).

Tanda-tanda fisik akibat perubahan iklim semakin terlihat karena adanya peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang mendorong suhu global pada tingkat yang bahaya. Dampaknya selain frekuensi bencana yang meningkat juga krisis pangan yang mempengaruhi ekonomi dunia (KLHK, 2019).

Bumi mengalami perubahan iklim secara natural yang merupakan siklus alami, tetapi yang terjadi saat ini, perubahan iklim mayoritas diakibatkan oleh aktivitas manusia melalui gas-gas rumah kaca (Sasetyaningtyas, 2018).

Perubahan iklim mempengaruhi kualitas lingkungan mulai dari kualitas udara dan air. Penurunan kualitas tersebut akan

mempengaruhi kesehatan manusia (Susilawati, 2021).

Perubahan iklim turut mempengaruhi adanya ketersediaan air karena pola dan curah hujan yang berubah. Sementara pergeseran musim berkaitan dengan maju mundur penanaman. Beberapa dampak kejadian iklim ekstrim diantaranya adalah penurunan produksi dan produktivitas, peningkatan intensitas gangguan OPT, penyakit tanaman dan serangan hama, kegagalan panen, rusaknya sumber daya lahan pertanian (Rohning, 2019).

Hal tersebut membuat banyak pihak fokus untuk menangani masalah akibat dampak perubahan iklim. Dalam mengatasi perubahan iklim perlu dilakukan pengelolaan lingkungan. Aspek penting dalam kegiatan lingkungan ialah dengan mengikutsertakan masyarakat tingkat tapak terkait seluruh kegiatan yang berkaitan dengan upaya pengelolaan lingkungan tersebut. Dalam hal pengelolaan lingkungan, masyarakat menjadi aktor utama (Mustangin, 2017).

Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah suatu program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam melakukan penguatan kapasitas adaptasi terkait penurunan emisi GRK dan dampak perubahan iklim. Program berlingkup nasional tersebut juga bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap upaya yang dilakukan masyarakat dalam melakukan kegiatan aksi adaptasi dan mitigasi terkait perubahan iklim. ProKlim didaftarkan pada wilayah administratif paling rendah di tingkat Rukun Warga (RW) dan paling tinggi di tingkat desa atau kelurahan (KLHK, 2017).

Aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi dampak perubahan iklim di tingkat lokal mencakup antara lain:

- a. Penanganan dan pencegahan terkait kenaikan muka air laut, rob, intrusi air laut, abrasi, atau erosi yang diakibatkan angin dan gelombang tinggi.
- b. Pengendalian bencana banjir, longsor dan kekeringan.
- c. Pengelolaan limbah padat, limbah cair dan sampah
- d. Pengendalian penyakit terkait iklim
- e. Peningkatan ketahanan pangan
- f. Mempertahankan dan/atau meningkatkan tutupan vegetasi
- g. Penanganan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca
- h. Penggunaan energi baru, penghematan energi
- i. Penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan

(Direktorat Adaptasi PI, 2017)

Program Kampung Iklim telah terlaksana di Pulau Sulawesi dan tersebar di berbagai wilayah, termasuk Provinsi Sulawesi Selatan. ProKlim sudah terlaksana sejak tahun 2012. Selama ini, pengusulan ProKlim lebih banyak dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga perlu dilakukan evaluasi terkait pemahaman masyarakat (diwakili kelompok/penggerak ProKlim) dalam pelaksanaan ProKlim yang ada di lokasi mereka. Mengacu pada latar belakang tersebut, maka diperlukan evaluasi Program Kampung Iklim yang telah terlaksana untuk menjadi bahan perbaikan pada kegiatan ProKlim selanjutnya. Sehingga peneliti melakukan penelitian tentang “Evaluasi Pelaksanaan Program Kampung Iklim di Empat Zonasi Pantai Provinsi Sulawesi Selatan”.

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Sulawesi di Makassar dengan lokus wilayah 4 zonasi Pantai di Provinsi Sulawesi Selatan

yaitu Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa.

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama 3 bulan mulai dari bulan Agustus sampai Oktober 2023.

B. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner, alat tulis kantor dan laptop.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari pengamatan secara langsung untuk tujuan penelitian dengan cara menyebarkan kuisioner yang diberikan kepada pemerintah daerah dan perwakilan dari kelompok/masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung diberikan seperti melalui orang lain atau dalam bentuk dokumen. Data yang dikumpulkan adalah data *time series* Program Kampung Iklim Provinsi Sulawesi Selatan 5 tahun terakhir mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

D. Prosedur Penelitian

Metode yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu pengumpulan data, pengolahan dan analisa data. Analisis data yang digunakan adalah analisis data dengan Skala Likert.

Metode deskriptif kualitatif menurut Sugiyono (2020) adalah metode penelitian yang dipakai dalam meneliti suatu keadaan objek alamiah dengan mempelajari sesuatu secara maksimal bertujuan untuk menjawab, menjelaskan, dan menggambarkan permasalahan yang diteliti dengan detail.

Menurut Hardani dkk., (2020), penelitian kualitatif tidak ada satupun yang sesuai untuk dijadikan sebagai instrumen penelitian selain manusia yang dapat melakukan penelitian tersebut dan hasil dari penelitiannya berupa pernyataan atau deskripsi tetapi tidak mempunyai bentuk atau hasil yang pasti dan tidak bisa diprediksi.

a. Pengumpulan data

Pada penelitian ini proses pengambilan data adalah dengan

mengumpulkan informasi dan data dari instansi Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Sulawesi dan membagikan *link* melalui media *google form* yang selanjutnya di sebarakan melalui media sosial (*WhatsApp*) kepada responden.

Data yang dikumpulkan berupa data lokasi ProKlim dari tahun 2018 sampai dengan 2022. Selain data lokasi, peneliti juga mengambil data primer di lapangan dengan quisioner. Jumlah populasi pada penelitian ini meliputi 245 lokasi ProKlim di Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian dibagi menjadi 4 wilayah sesuai dengan letak zonasi pantai di Provinsi Sulawesi Selatan. Data lain yang dikumpulkan adalah data 36 orang pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah yang memiliki tupoksi tentang Program Kampung Iklim di Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup.

b. Instrumen Penelitian

Evaluasi Program Kampung Iklim di Empat Zonasi Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan menyebarkan quisioner kepada perwakilan pemerintah daerah dan Masyarakat di lokasi ProKlim menggunakan metode *Purposive Sampling*. Dalam penentuan sampel, peneliti menyusun kriteria-kriteria responden yang dapat mengisi quisioner agar bisa mendapatkan sampel responden yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Tabel 1. Jumlah Lokasi ProKlim di Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018- 2022

Kab/Kota	Jumlah ProKlim	Wilayah	
Pangkajene Dan Kepulauan Barru	6	Pantai Barat	
Pinrang	4		
Pare-Pare	6		
Maros	1		
Kota Makassar	29		
Bone	12	Pantai Timur	
Sinjai	41		
Luwu Utara	10		
Wajo	5		
Sidenreng Rappang	10		
Luwu Timur	4		
Luwu	4		
Palopo	1		
Bulukumba	1		Pantai Selatan
Jeneponto	31		
Takalar	1		
Kepulauan Selayar	0		
Bantaeng	4		
Tana Toraja	6	Peralihan	
Toraja Utara	4		
Enrekang	24		
Soppeng	10		
Gowa	30		
Jumlah Lokasi	245		

Sumber : Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Sulawesi (2023) dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut (2023).

Jumlah lokasi proklim berdasarkan letak zonasi Pantai di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 245 lokasi. Lokasi tersebut merupakan lokasi kampung iklim terdaftar tanpa registrasi ulang. Kriteria Penentuan Sampel Lokasi Proklim:

- a) Mewakili zonasi pantai di Provinsi Sulawesi Selatan
- b) Jumlah Program Kampung Iklim paling banyak di masing-masing wilayah
- c) Kelompok proklimnya aktif dan berkelanjutan
- d) Kabupaten/Kota yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai pembina proklim di Daerah.

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh lokasi pengambilan sampel yaitu Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling*.

Teknik *Purposive sampling* merupakan suatu teknik dalam pengambilan sampel dengan target individu yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan peneliti (Turner, D. P., 2020). Sedangkan menurut Firmansyah Deri dan Dede (2022), *Purposive sampling* merupakan pengambilan sampel penilaian yang subjektif atau selektif yang berfokus pada penilaian peneliti dalam memilih unit sampel yang akan dipelajari.

Tabel 2. Penentuan Sampel Responden Perwakilan Kelompok/Masyarakat di Lokasi Proklim

Kab/Kota	Jumlah ProKlim	Lokasi Sampling	Jumlah Sampling	Responden
Maros	29 Lokasi	3 Lokasi	9 Orang	Kepala Desa/Ketua Kelompok/ Anggota Kelompok
Bone	41 Lokasi	4 Lokasi	12 Orang	Kepala Desa/Ketua Kelompok/ Anggota Kelompok
Bulukumba	31 Lokasi	3 Lokasi	9 Orang	Kepala Desa/Ketua Kelompok/ Anggota Kelompok
Gowa	30 Lokasi	3 Lokasi	9 Orang	Kepala Desa/Ketua Kelompok/ Anggota Kelompok
Jumlah	131 Lokasi	13 Lokasi	39 Orang	

Kelompok ProKlim yang diwawancarai berasal dari 13 lokasi yang mewakili masing-masing zonasi Pantai di Provinsi Sulawesi Selatan dengan total jumlah sampel sebanyak 39 orang.

1. Kriteria Penentuan Sampel untuk Perwakilan Kelompok/Masyarakat yang mewakili :
 - a) Mewakili lokasi yang didaftarkan pada Program Kampung Iklim
 - b) Berperan dalam kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
 - c) Aktif dalam kelembagaan yang didaftarkan pada ProKlim

Tabel 3. Penentuan Sampel Responden Perwakilan Pemerintah Daerah di Lokasi ProKlim

Kab/ Kota	Jumlah Pegawai Yang Menangani Proklm	Jumlah Sampling	Responden
Maros	15	5	ASN/Non ASN/Struktural/Fungsional di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Maros
Bone	7	3	ASN/Non ASN/Struktural/Fungsional di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone
Bulukumba	13	4	ASN/Non ASN/Struktural/Fungsional di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba
Gowa	1	1	ASN/Non ASN/Struktural/Fungsional di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa
JUMLAH	36	13	

1. Kriteria Penentuan Sampel untuk Pemerintah Daerah yang mewakili:
 - a) Memiliki tupoksi tentang Proklm
 - b) Pernah mendaftarkan proklm di Sistem Registri Nasional (SRN)
 - c) Berperan dalam pendampingan kegiatan ProKlim.

Tim ProKlim yang diwawancarai sebanyak 13 orang dari 36 pegawai yang berperan dalam pelaksanaan ProKlim dan mewakili masing-masing zonasi Pantai di Provinsi Sulawesi Selatan.

c. Pengolahan data

Skala Likert digunakan peneliti untuk mengukur pendapat, sikap ataupun persepsi sekelompok orang atau seseorang yang berkaitan dengan fenomena sosial. Peneliti menetapkan fenomena sosial secara spesifik dan dikenal dengan istilah variable penelitian (Sugiyono, 2018).

Skala Likert adalah teknik pengukuran yang biasanya dipakai dalam kuisisioner, reset dan angket berupa survei yang paling banyak, Sugiyono (2010). Skala

likert merupakan skala pengukuran yang dikembangkan oleh Likert (1932).

Diketahui bahwa Skala likert memiliki empat atau lebih butir-butir pernyataan atau pertanyaan dan dikombinasikan sehingga membentuk skor atau nilai. Skor tersebut dapat merepresentasikan sikap dan sifat individu, termasuk pengetahuan dan perilaku masyarakat. Proses analisis dan komposit data menggunakan rataan atau jumlah dari setiap pertanyaan yang dipergunakan.

Jawaban setiap item instrument quisioner memakai skala Likert yang di dalamnya memiliki gradasi dari yang sangat positif hingga negative yang dapat berupa kata – kata :

- a. Sangat Setuju/Sangat Paham
- b. Setuju/Paham
- c. Ragu-ragu
- d. Tidak Setuju/Tidak Paham
- e. Sangat Tidak Setuju/Sangat Tidak Paham

(Sugiyono, 2018)

Dalam perhitungan menggunakan skala Likert, rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Rumus } T \times P_n$$

Ket :

T = Total Jumlah Respon yang Memilih
 Pn = Pilihan angka skor Likert

Menurut Arifin (2010), data yang diperoleh tersebut bisa diolah menggunakan rumus Index yaitu :

$$P = \frac{\sum R}{N} \times 100\%$$

Ket :

P = Persentase

$\sum R$ = Jumlah jawaban yang diberikan oleh responden

N = Jumlah skor maksimal atau ideal.

Menurut Sugiono (2018), sebelum menyelesaikan menggunakan rumus Indeks, perlu diketahui berapa interval (rentang jarak) dan interpretasi persen agar dapat mengetahui penilaian. Caranya adalah dengan rumus Interval skor persen (I).

$$\text{Rumus Interval (I) = } 100 / \text{Jumlah Skor Likert}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

a. Sebaran Program Kampung Iklim (ProKlim) di Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 tahun terakhir (2018-2022)

Selama 5 tahun terakhir, pendaftaran kampung iklim di Sulawesi Selatan memiliki tingkat partisipasi yang bervariasi dan berfluktuasi..



Gambar1.Data Histogram Jumlah Lokasi ProKlim di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Jumlah lokasi kampung iklim paling tinggi di Provinsi Selatan adalah pada tahun 2022 dengan jumlah lokasi sebanyak 71 dan paling sedikit adalah tahun 2021 sejumlah 30 lokasi. Sebaran ProKlim terlihat tidak merata karena setiap daerah memiliki keunggulan dan kendala yang berbeda-beda.

Tabel 4. Sebaran Lokasi ProKlim di Provinsi Sulawesi Selatan yang terdaftar tahun 2018-2022

Kab/Kota	Tahun Lokasi Terdaftar					Jumlah Terdaftar	Wilayah
	2018	2019	2020	2021	2022		
Pangkajene							
Dan Kepulauan	3	1		1	1	6	Pantai Barat
Barru		2		1	1	4	
Pinrang					6	6	
Pare-Pare					1	1	
Maros		4	22	2	1	29	
Kota Makassar	1	1	4	2	4	12	Pantai Timur
Bone	11	6	4	12	8	41	
Sinjai	3	1	4	1	1	10	
Luwu Utara	1	2	1	1		5	
Wajo	2	4	1	1	2	10	
Sidenreng							Pantai Selatan
Rappang	2	2				4	
Luwu Timur	2	1			1	4	
Luwu					1	1	
Palopo					1	1	
Bulukumba	11	6		1	13	31	Peralihan
Jeneponto				1		1	
Takalar	1					1	
Kepulauan						0	
Selayar		1			3	4	
Bantaeng					3	6	Peralihan
Tana Toraja	1		1	1	3	4	
Toraja Utara				1	3	4	
Enrekang	6	6	5	1	6	24	
Soppeng	2	1	3	2	2	10	
Gowa	1	9	5	2	13	30	
Jumlah Lokasi Yang Terdaftar Proklim	47	47	50	30	71	245	

Sumber : Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Sulawesi (2023) dan dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut (2023).

Data tersebut merupakan jumlah lokasi kampung iklim terdaftar tanpa registrasi ulang.

Terdapat beberapa kabupaten yang tidak mendaftarkan ProKlim di tahun-tahun tertentu seperti Kabupaten Pinrang, Kota Parepare, Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang diketahui baru mulai mengusulkan lokasi di tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan kurangnya koordinasi yang dilakukan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat di tingkat tapak. Selain itu, pergeseran sumberdaya manusia di pemerintah daerah juga seringkali menjadi kendala pelaksanaan ProKlim. Jarak dan akses lokasi kampung iklim yang jauh juga seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaan program tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan peningkatan kerjasama antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan sosialisasi atau bimbingan teknis tentang ProKlim yang mampu menjangkau semua wilayah yang sulit diakses.



Gambar 2. Data Histogram Jumlah Lokasi ProKlim Berdasarkan Wilayah Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2019

b. Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam mempengaruhi hasil Proklim di Provinsi Sulawesi Selatan

Penelitian disajikan dalam bentuk tabulasi data yang merupakan hasil dari pengisian pernyataan yang dibagikan peneliti secara *online* menggunakan media *google form*. Pertanyaan diberikan kepada 20 orang pegawai di pemerintah daerah yang memiliki tupoksi tentang ProKlim dan 41 orang perwakilan dari masyarakat.

- 1) Pengolahan Data untuk Section Pemerintah Daerah

Peneliti memberikan 15 pernyataan yang tiap pernyataannya diisi oleh 20 orang responden. Maka jumlah keseluruhan pada *section* perwakilan pemerintah daerah ini adalah sebanyak 300 jawaban, dengan masing-masing menjawab sangat paham sebanyak 60, paham 233, dan ragu-ragu 7.

Tabel 5. Pengolahan data untuk perwakilan pemerintah daerah

Skala Jawaban	T x Pn	Hasil
Sangat Paham	60 x 5	300
Paham	233 x 4	932
Ragu-ragu	7 x 3	21
Tidak Paham	0 x 2	0
Sangat tidak paham	0 x 1	0
Total Skor		1253

Dari data tersebut diketahui perhitungan sebagai berikut :

$$X = \text{Skor Terendah Likert} \times \text{Jumlah Responden}$$

$$X = 1 \times 20 \times 15$$

$$X = 300$$

Jumlah skor ideal (kriterium) untuk seluruh item adalah 300 (seandainya semua menjawab sangat tidak paham).

$$Y = \text{Skor Tertinggi Likert} \times \text{Jumlah Responden}$$

$$Y = 5 \times 20 \times 15$$

$$Y = 1.500$$

Jumlah skor ideal (kriterium) untuk seluruh item adalah 1.500 (seandainya semua menjawab sangat paham).

Jumlah skor terendah untuk item “Sangat Tidak Paham” adalah 300, sedangkan item “Sangat Paham” adalah 1500. Jika total skor penilaian diperoleh angka 1253, maka penilaian interpretasi dari pemerintah daerah terhadap ProKlim adalah hasil nilai yang dihasilkan dengan menggunakan rumus Index % yaitu :

$$P = \frac{\Sigma R}{N} \times 100\%$$

$$= 1253 / 1500 \times 100$$

$$= 83,53\% \text{ (Sangat Paham).}$$

Hasil untuk pernyataan dari *Section* Pemerintah adalah **Sangat Paham**.

Pernyataan yang diolah dari 20 orang pegawai di pemerintah daerah adalah 83,53% (sangat paham) artinya perwakilan pemerintah daerah sebagian besar memahami komponen-

komponen dalam kegiatan Program Kampung Iklim.

2) Pengolahan Data Section Perwakilan Kelompok/Masyarakat

Pernyataan yang diberikan peneliti adalah 15 pernyataan yang tiap pernyataannya diisi oleh 41 orang. Jumlah jawaban pada *section* Perwakilan Kelompok/Masyarakat ini adalah 615 jawaban, dengan masing-masing menjawab sangat paham sebanyak 69, paham 491, ragu-ragu 33 dan tidak paham sebanyak 22.

Tabel 6. Pengolahan Data untuk Perwakilan kelompok/masyarakat

Skala Jawaban	T x Pn	Hasil
Sangat Paham	69 x 5	345
Paham	491 x 4	1964
Ragu-ragu	33 x 3	99
Tidak Paham	22 x 2	44
Sangat tidak paham	0 x 1	0
Total		2452

Dari data tersebut diketahui perhitungan sebagai berikut :

$$X = \text{Skor Terendah Likert} \times \text{Jumlah Responden}$$

$$X = 1 \times 41 \times 15$$

$$X = 615$$

Jumlah skor ideal (kriterium) untuk seluruh item adalah 615 (seandainya semua menjawab sangat tidak paham).

$$Y = \text{Skor Tertinggi Likert} \times \text{Jumlah Responden}$$

$$Y = 5 \times 41 \times 15$$

$$Y = 3075$$

Jumlah skor ideal (kriterium) untuk seluruh item adalah 3075 (seandainya semua menjawab sangat paham). Jumlah skor terendah untuk item “Sangat Tidak Paham” adalah 615, sedangkan item “Sangat Paham” adalah 3075. Jadi jika total skor penilaian diperoleh angka 2452, maka penilaian interpretasi dari perwakilan kelompok/masyarakat terhadap ProKlim adalah hasil nilai yang dihasilkan dengan menggunakan rumus Index % sebagai berikut:

$$P = \frac{\Sigma R}{N} \times 100\%$$

$$= 2452 / 3075 \times 100$$

$$= 79,73\% \text{ (Paham).}$$

Hasil untuk pernyataan yang diberikan kepada Perwakilan Kelompok/Masyarakat adalah **Paham**.

Pernyataan yang telah diolah dari 41 orang perwakilan kelompok atau masyarakat diperoleh hasil 79,73% (paham) artinya sebagian besar kelompok masyarakat di lokasi kampung iklim memahami komponen yang menjadi bagian dalam program.

B. Pembahasan

ProKlim merupakan salah satu dari kegiatan strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dapat dilakukan langsung oleh masyarakat dalam mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan dan terintegrasi di tingkat tapak untuk mendukung target dari pencapaian NDC Indonesia (Direktorat Jenderal PPI, 2020).

Pelaksanaan ProKlim terus diperkuat berbanding lurus dengan prioritas dari Renstra Kementerian LHK Tahun 2020 – 2024 dalam mendukung program ketahanan bencana serta perubahan iklim. Program ini tidak bisa dipisahkan dalam membangun lingkungan hidup yang Lestari dan memperkuat ketahanan ekonomi. Tren pendaftaran kampung iklim yang beragam dari tahun ke tahun harus diiringi dengan kebutuhan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi ProKlim paling banyak pertama ada di Pantai Timur yaitu Kabupaten Bone sebanyak 41 lokasi. Kedua terbanyak adalah wilayah Pantai Selatan yaitu Bulukumba dengan 31 lokasi, ketiga di wilayah peralihan adalah Kabupaten Gowa yaitu sebanyak 30 lokasi dan di Wilayah Pantai Barat yaitu Kabupaten Maros sebanyak 29 lokasi. Secara keseluruhan, lokasi terbanyak adalah Kabupaten Bone dan yang tidak ada data adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Lokasi kampung iklim paling banyak ada di tahun 2022 dengan jumlah total 71 lokasi dan yang terendah adalah tahun 2021 sebanyak 30 lokasi. Jumlah lokasi di tahun

2021 paling sedikit dikarenakan adanya *pandemic Covid-19* yang tinggi di tahun tersebut sehingga mengurangi mobilitas pemerintah dalam proses pendaftaran ProKlim dan pengumpulan data di lapangan.

Perbedaan jumlah lokasi di masing-masing wilayah perlu dijadikan sebagai bahan evaluasi terkait pelaksanaan Program Kampung Iklim di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Banyak sedikitnya jumlah lokasi yang diusulkan ditentukan oleh banyak faktor diantaranya adalah :

1. Tingkat partisipasi pemerintah daerah
Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang berperan dalam mengusulkan banyak lokasi ProKlim umumnya karena lebih sering mengikuti sosialisasi ProKlim yang dilaksanakan oleh Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Sulawesi.
2. Jarak dan akses lokasi
Jarak dan akses ke lokasi proklam turut mempengaruhi pemerintah daerah dalam berkoordinasi terkait ProKlim baik koordinasi dengan masyarakat maupun berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
3. Sumberdaya Manusia di pemerintah daerah
Pemerintah daerah lebih sering mengalami pergantian pegawai sehingga dibutuhkan penyegaran tentang sosialisasi ProKlim setiap tahunnya.
4. Kurangnya pemahaman tentang kegiatan
Sosialisasi ProKlim ke masyarakat tidak dilaksanakan oleh semua kabupaten/kota di Provinsi Selatan sehingga masih ada masyarakat yang belum memahami substansi dan cara pendaftaran ProKlim.

5. Ketersediaan anggaran Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki ketersediaan anggaran yang berbeda-beda sehingga ada kabupaten/kota yang banyak mendaftarkan ProKlim ada yang sedikit atau tidak sama sekali.

6. Dukungan Regulasi Lokasi kampung iklim didukung dengan kelembagaan atau kelompok yang diresmikan oleh pemerintah baik oleh pemerintah desa, pemerintah kecamatan, kabupaten ataupun pemerintah pusat sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi jumlah dan sebaran ProKlim saat ini. Upaya adaptasi dan mitigasi dalam perubahan iklim merupakan integrasi dari penguatan kelembagaan dan kegiatan pengelolaan lingkungan di tingkat tapak (Direktorat Jenderal PPI, 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pihak pemerintah memiliki pemahaman 83,53% (sangat paham) dan untuk perwakilan di lokasi proklim memiliki pemahaman sebesar 79,73% (paham) terkait dengan tujuan, pelaksanaan dan substansi dalam ProKlim.

Ada beberapa masukan terkait hambatan dan kendala yang dialami Dinas Lingkungan Hidup selaku pemerintah daerah yang menangani dan memiliki tupoksi tentang ProKlim yang bertujuan untuk pengembangan ProKlim ke depan, beberapa diantaranya adalah :

1. Dinas Lingkungan Hidup mengharapkan adanya peningkatan keterlibatan, koordinasi dan kerjasama dengan kementerian lain selain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Pergantian pegawai di instansi yang memahami dan memiliki tupoksi tentang ProKlim juga menyulitkan pegawai dalam melakukan pembinaan

ke lokasi-lokasi calon proklim karena berubahnya personil.

3. Hambatan lainnya adalah karakteristik setiap orang di calon lokasi ProKlim yang bervariasi sehingga ada lokasi yang bisa bekerjasama untuk pengusulan lokasi ProKlim dan ada yang sulit untuk dijangkau.

Tingkat pemahaman masyarakat yang tinggi yaitu 79,73% (paham) oleh perwakilan kelompok/masyarakat menunjukkan keberhasilan penyampaian ProKlim oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta adanya kerjasama pemerintah pusat dan daerah sekaligus masyarakat di tingkat tapak dalam melaksanakan program kampung iklim. Saran dari perwakilan kelompok/masyarakat di lokasi ProKlim diantaranya adalah :

1. Masyarakat mengharapkan adanya edukasi dan sosialisasi yang lebih intens seperti pelatihan atau sosialisasi sehingga masyarakat bisa meningkatkan kegiatan-kegiatan adaptasi dan mitigasi yang telah dilakukan.
2. Masyarakat di lokasi mengharapkan adanya peran instansi lain selain Dinas Lingkungan Hidup untuk mendukung pendampingan dan peningkatan kapasitas di lokasi ProKlim seperti keterlibatan akademisi dan pihak swasta.
3. Masyarakat mengharapkan adanya pendampingan yang intens untuk lebih mendorong kemandirian masyarakat dalam menjaga keberlangsungan lingkungan agar tetap lestari.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Sebaran Program Kampung Iklim (ProKlim) di Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 tahun terakhir (2018-2022) paling tinggi ada di tahun 2022 dengan jumlah lokasi sebanyak 71 dan

paling sedikit adalah tahun 2021 sejumlah 30 lokasi. Tahun 2021 memiliki lokasi kampung iklim yang lebih sedikit karena pandemi *covid 19* yang menyebabkan terbatasnya masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan ProKlim.

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman untuk section pemerintah adalah 83,53% (sangat paham) dan section perwakilan di lokasi ProKlim adalah 79,73% (paham).
3. Evaluasi pelaksanaan ProKlim di Empat Zonasi Pantai Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan menunjukkan bahwa Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa menjadi kabupaten yang paling baik dalam pelaksanaan ProKlim karena pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup aktif dalam memberikan pendampingan hingga pendaftaran kampung iklim.

Namun, diketahui bahwa regulasi dan pendanaan yang diberikan pemerintah memberikan dukungan yang sangat signifikan dalam pelaksanaan ProKlim sehingga Kabupaten Bone dan Kabupaten Bulukumba menjadi kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang paling banyak dan berkontribusi positif dalam pelaksanaan ProKlim. Tingkat partisipasi masyarakat dan pemerintah yang tinggi dan beragamnya upaya adaptasi dan mitigasi yang dilakukan mencerminkan kesadaran mereka terhadap pelestarian lingkungan melalui ProKlim. Diharapkan, kesimpulan ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan strategi dan peningkatan jumlah lokasi kampung iklim yang lebih efektif serta berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin. 2010. Evaluasi Pembelajaran. Bandung: Remaja Rosdakarya

Balai PPI Wilayah Sulawesi. 2023. Data Lokasi Program Kampung Iklim Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022. Makassar.

Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim, Ditjen PPI. 2017. Buku Praktis Progam Kampung Iklim. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. 2020. Rencana Strategis Ditjen PPI Tahun 2020-2024. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Firmansyah Deri dan Dede. 2022. Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literatur Review. Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH) Vol.1, No.2 2022:85-114.

Hardani, dkk. 2020. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu

Mustangin, M. 2017. Perubahan Iklim dan Aksi Menghadapi Dampaknya: Ditinjau dari Peran Serta Perempuan Desa Pagerwangi. Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, 4 (1), 2017, 80-89.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2019. Dampak Perubahan Iklim Kian Mengkhawatirkan. http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?page=detail_news&newsid=861. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2023.

Kuswinanti, T., Jayadi, M., & Larekeng, S. T. (2023). Soil function analysis in determining the soil quality index of paddy fields in Salassae Village, Bulukumba Regency, South Sulawesi Province, Indonesia. *Agricultural Science Digest-A Research Journal*, 43(1), 40-45

Likert RA. 1932. Technique for the measurement of attitudes. *Archives of Psychology*, 140 pp: 1-55

Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.4/PPI/API/PPI.0/3/2021 Tentang

Pedoman Penyelenggaraan Program
Kampung Iklim.

Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan
Laut. 2023. Buku Peta
Kertas. https://eshop.pushidrosal.id/list_buku_kertas Diakses pada tanggal 15
Oktober 2023

Restu, M., Irmawati, I., Nirawati, N., Larekeng,
S. T., & Hadija, H. (2022, December).
Smart mitigation berbasis kearifan lokal
dalam pencegahan banjir di wilayah
Kelurahan Allepolea, Kabupaten Maros.
In *Prosiding Seminar Nasional Politeknik
Pertanian Negeri Pangkajene
Kepulauan* (Vol. 3, pp. 785-795).

Rohning S. 2019. Perubahan Iklim dan
Dampaknya Terhadap Sektor Pertanian.
<http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/70105/PERUBAHAN-IKLIM-DAN-DAMPAKNYA-TERHADAP-SEKTOR-PERTANIAN/> Diakses pada 15 Oktober
2023 Pukul 10.31 WITA.

Sasetyaningtyas, Dwi. 2018. Mengenal
Perubahan Iklim Dan Dampaknya
Terhadap Lingkungan.
<https://Sustaination.Id/Perubahan-iklim/2018>. Diakses pada 15 Oktober
2023 Pukul 10.08 WITA.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif
Kualitatif & RND, Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kombinasi
(*Mixed Methods*), Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif
Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Susilawati. 2021. Dampak Perubahan Iklim
Terhadap Kesehatan. Magister Ilmu
Lingkungan Program Pasca Sarjana
Universitas Jambi. e-SEHAD, Volume 1,
Nomor 2, Juni 2021, Hal: 25-31

Turner, D. P. 2020. Sampling Methods in
Research Design. *Headache*, 60, 8-12.
<https://doi.org/10.1111/head.13707>